



BTT Rp57 M untuk Gelombang Ketiga

■ Pemkot Yogya Pastikan Responsif Tangani Pandemi

YOGYA, TRIBUN - Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta memastikan struktur APBD 2022 dalam kondisi siap untuk menghadapi gelombang tiga pandemi Covid-19. Sehingga, eksekutif yakin dapat melakukan upaya penanggulangan yang lebih baik dibandingkan Juli 2021 silam.

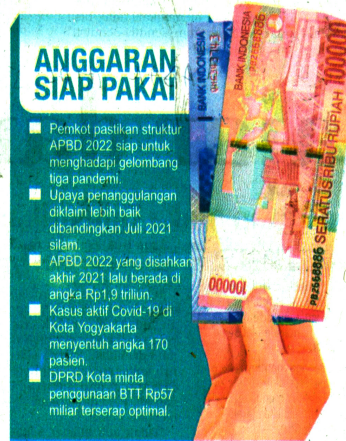
Wakil Wali Kota Yogyakarta, Heroe Poerwadi, menuturkan APBD 2022 yang disahkan akhir 2021 lalu berada di angka Rp1,9 triliun. Selama masa penyusunan, ia menegaskan, antara eksekutif dan legislatif sepakat agar strukturnya dibuat responsif terkait penanganan pandemi.

"Jadi, APBD 2022 lebih responsif untuk mempersiapkan antisipasi pandemi Covid-19, apalagi disusunya di masa PPKM juga kan," tandas Heroe, Kamis (3/2).

Karena itu, dirinya meyakini, Pemkot tak akan kelabakan menghadapi potensi gelombang tiga pandemi yang sudah berada di depan mata. Tetapi, bagaimanapun, ia berharap, sebaran Covid-19 di kota pelajar bisa terkendali, meski belakangan tren kasus mengalami lonjakan.

"Sejak awal kita merespons kondisi PPKM juga. Kesiapan terhadap pelaksanaan antisipasi, misalnya di Yogya nanti terjadi gelombang tiga (pandemi), kita sudah siapkan itu semuanya lewat APBD 2022," terang Wawali.

Walaupun begitu, Heroe tak menutup kemungkinan, upaya relokusung tetap diperlukan, meski Belanja Tidak Terduga (DTT) sudah dialokasikan. Khususnya, jika penyebaran Covid-19 kembali melonjak signifikan, sehingga butuh penanganan-penanganan yang le-



GRAFIS/FAUZIA RAHKMAN

bih spesifik.

"Nanti kalau misal ada ledakan kasus, pertumbuhannya semakin luas, dan membutuhkan penanganan dengan anggaran yang lebih tinggi, ya baru kita laksanakan relokusung, kita siapkan," ujarnya.

Di sisi lain, kasus aktif Covid-19 di Kota Yogyakarta melonjak signifikan menyentuh angka 170, setelah didapati 60 tambahan sekaligus dalam sehari, Kamis (3/2). Hal tersebut disikapi Pemkot setempat dengan merumuskan pengetatan kegiatan dan aktivitas masyarakat.

Heroe Poerwadi memaparkan, semakin merbaknya virus corona harus mendapat perhatian penuh. Alhasil, penduduk harus bersikap menghadapi pengetatan kembali, meski status PPKM Kota Yogyakarta saat ini ma-

sih di level 2.

"Kami sedang rumuskan, mengenai pelaksanaan kegiatan sosial, maupun kemasyarakatan. Harus kita tata kembali, terkait proses," katanya.

Dia tidak memungkirkan, melonjaknya kasus Covid-19 di wilayahnya ini merupakan dampak dari mobilitas masyarakat yang semakin leluasa. Sehingga, mau tidak mau, kontrol wajib diperketat lagi, supaya sebaran virusnya tak semakin meluas.

"Jadi, di masa perpanjangan PPKM di Februari ini, bakal didorong (pengetatan), supaya bisa lebih mengantisipasi perkembangan Covid-19," lanjut Wawali.

Maksimalkan

Sementara itu, kalangan legislatif berharap Pemkot Yogyakarta dapat memaksimalkan struktur APBD 2022

untuk mengantisipasi gelombang tiga pandemi Covid-19. Ketua DPRD Kota Yogyakarta, Danang Rudyatmoko, menjelaskan, dalam pembahasannya bersama eksekutif, struktur APBD 2022 tetap disesuaikan dengan situasi, dan kondisi pandemi Covid-19. Sementara alokasi BTT (Belanja Tidak Terduga) juga mengalami peningkatan.

"Struktur di APBD 2022 memang masih menyesuaikan, karena BTT yang kita plot sampai Rp57 miliar. Anggaran tersedia kok," tegas Danang.

Karena itu, legislatif mendorong Pemkot Yogyakarta agar APBD yang sudah dibuat sedemikian responsif tersebut, dimaksimalkan untuk melakukan berbagai antisipasi. Sehingga, insiden-insiden yang terjadi saat puncak gelombang dua Juli 2021 lalu tidak terulang.

"Kan masih kita sesuaikan, sekarang tinggal bagaimana penanganannya. Jangan sampai ada kelangkaan ruang perawatan, atau oksigen lagi lah," cetusnya.

Di samping itu, ia juga menuntut eksekutif, untuk segera menahan laju mobilitas warga masyarakat, mengingat sebaran Covid-19 akhir-akhir ini semakin meningkat. Sementara, aktivitas pariwisata, khususnya setiap penghujung pekan, keramaiannya luar biasa.

"Kita lihat sekarang, kondisi pariwisata tiap akhir pekan, Jumat, Sabtu, Minggu, sudah seperti masa normal. Nah, kedepannya pasti berdampak," ungkapnya.

"Harus bisa diantisipasi, meskipun secara anggaran ada, tetapi, jangan sampai terjadi lagi lonjakan kasus seperti kemarin," pungkasan politikus PDIP itu. (aka)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Badan Perencanaan Pembangunan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. BPKAD			

Yogyakarta, 02 Juli 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005